

RINCIAN KEGIATAN BIDANG POLITIK BULAN JUNI 2020

1. Rapat Tim Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020 (1 Laporan).



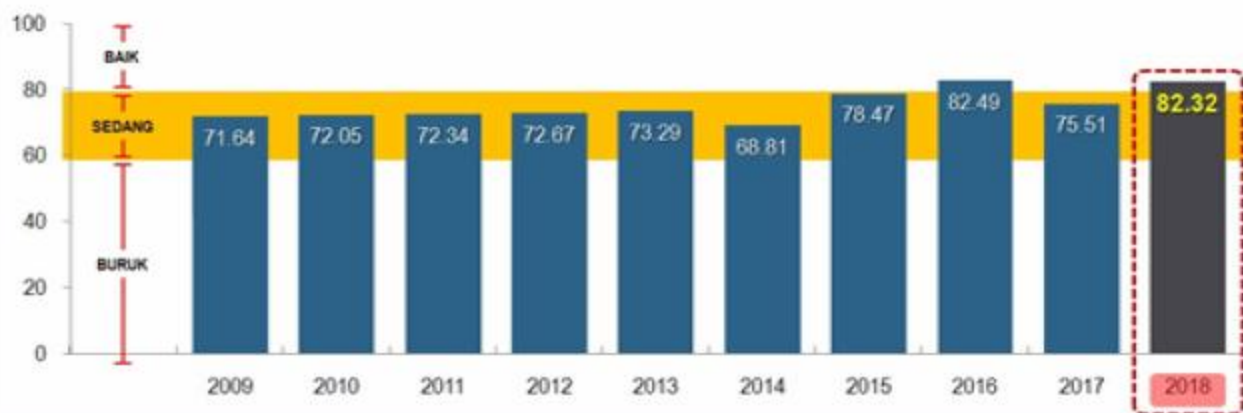
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN PELAKSANAAN

RAPAT TIM

KELOMPOK KERJA (POKJA) INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERKEMBANGAN IDI NTT, 2009-2018



- ▶ Indeks Demokrasi NTT tahun 2018 mencapai **82,32** naik 6,81 poin dibandingkan tahun 2017
- ▶ Tingkat Demokrasi di NTT secara umum masuk dalam kategori **BAIK**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2020**

LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) NTT BERSAMA BAPPELITBANGDA DAN INSTANSI TERKAIT LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Seiring dengan tuntutan reformasi terhadap demokratisasi, maka Pemerintah Indonesia berhasil mengembangkan alat ukur untuk menilai kemajuan demokrasi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI dikembangkan menurut konteks Indonesia, dan bukan menggunakan instrumen yang dikembangkan di luar negeri. Oleh karena itu, IDI pada dasarnya merupakan country-led assessment yang dibangun atas fondasi kepemilikan nasional. IDI adalah alat ukur dengan menampilkan angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh Provinsi di Indonesia berdasarkan aspek tertentu dari demokrasi. Sebagai alat ukur, IDI menyediakan data yang penting bagi pemerintah dan stakeholder pembangunan mengenai tingkat demokrasi masing-masing provinsi di Indonesia.

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator komposit dan alat ukur pencapaian pembangunan politik dan demokrasi Nasional, disusun oleh Bappenas bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) atas dukungan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia sejak tahun 2009. Proses penyusunan IDI melibatkan Pemerintah Provinsi, DPRD, LSM, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Akademisi dan pekerja media di masing-masing Provinsi. Aspek penting demokrasi yang dijadikan alat ukur dalam IDI adalah: Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Ketiga aspek tersebut merupakan pilar dari konsep demokrasi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi atas konsep demokrasi, sedangkan aspek ketiga merefleksikan wadah dari proses demokrasi. Aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberties) mencakup 4 (empat) variabel, yaitu: Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkeyakinan, serta Kebebasan dari Diskriminasi.

Aspek Hak-Hak Politik (Political Rights) mencakup 2 (dua) variabel, yaitu: Hak Memilih dan Dipilih, serta Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Sementara aspek Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy) mencakup 5 (lima) variabel, yaitu: Pemilihan Umum yang Bebas dan Adil, Peran

DPRD, Peran Partai Politik, Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah, dan Peradilan yang Independen. Kesebelas variabel pada ketiga aspek tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi 28 indikator pengukuran dan penilaian Hasil IDI secara universal.

Dalam perjalanannya sejak tahun 2009, pencapaian hasil IDI baik secara nasional maupun di Provinsi se Indonesia sangat fluktuatif termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan situasi politik dan demokrasi yang sedang berlangsung. Karena itu jika dibandingkan dengan tahun 2017, berdasarkan hasil rilis angka IDI tahun 2018 oleh BPS Pusat tanggal 1 Agustus 2019, capaian hasil IDI NTT tahun 2018 sedikit mengalami peningkatan dengan capaian 82, 32 point dengan kategori BAIK dan menempatkan NTT berada pada peringkat 3 (tiga) Nasional, namun demikian masih terdapat 5 (lima) indikator IDI memiliki capaian kategori “Buruk” yaitu Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya, Presentase Anggota Perempuan DPRD Provinsi, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif dan Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah Daerah.

Sejalan dengan itu, dalam rangka melakukan upaya peningkatan hasil IDI NTT utamanya indikator berkategori **Buruk** tersebut menuju kategori **Sedang** bahkan kategori **“BAIK”** termasuk didalamnya implementasi pemanfaatan hasil IDI NTT tahun 2018 bagi perencanaan pembangunan demokrasi dan politik di Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan Rapat Tim Pokja IDI NTT bersama Bappelitbangda dan Instansi terkait Lingkup Provinsi NTT untuk mengevaluasi serta mencari solusi terkait indikator-indikator yang nilainya masih rendah

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 139/KEP/HK/2020 tanggal 3 April 2020 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5/KEP/HK/2020 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
3. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyampaian Hasil Rilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nusa Tenggara Timur tahun 2018 kepada Bappelitbangda bersama Instansi terkait lainnya dimana terdapat 5 (lima) indikator IDI memiliki capaian kategori “Buruk” yaitu Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya, Presentase Anggota Perempuan DPRD Provinsi, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif dan Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah Daerah.

2. Tujuan

Sinergitas antara Tim Pokja IDI NTT bersama Bappelitbangda serta instansi terkait lainnya dalam rangka peningkatan 5 (lima) indikator IDI memiliki capaian kategori “Buruk” yaitu Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya, Presentase Anggota Perempuan DPRD Provinsi, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif dan Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah Daerah.

IV. HASIL YANG DIHARAPKAN

- Tersedianya Program dan Kegiatan pada Instansi/OPD yang memiliki tugas dan fungsi berhubungan dengan Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nusa Tenggara Timur.
- Pembentukan sekretariat bersama Pokja IDI agar memudahkan Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur dalam memperoleh dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nusa Tenggara Timur.
- Membangun komitmen bersama untuk melaksanakan perbaikan demokrasi di Nusa Tenggara Timur melalui penyaringan data di lapangan secara akurat, baik dan benar, sehingga terciptanya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sejahtera dalam Bingkai NKRI.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

1) Waktu dan tempat

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2020
J a m : 09.00 wita – selesai
Tempat : Aula BAPPELITBANGDA Provinsi NTT, Jln Polisi
Militer No. 2 Oebobo – Kota Kupang

2) Peserta Rapat :

Peserta yang hadir adalah yaitu : Anggota Pokja IDI Provinsi NTT serta Pimpinan dan Staf pada Badan BAPPELITBANGDA, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

a. Kata Pembukaan

Dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol NTT, kemudian diserahkan ke Kepala Bidang pada BAPPELITBANGDA Provinsi NTT, untuk memandu jalannya rapat tersebut.

b. Pembahasan rapat

Rapat POKJA ini membahas agenda :

- Tatap muka Tim Pokja IDI Tahun 2020 bersama Pimpinan dan Staf pada Badan BAPPELITBANGDA Provinsi NTT.
- Membahas Aspek, Variabel dan Indikator IDI 2018 yang masih dibawah standar.
- Penjelasan BPS tentang Variabel IDI Tahun 2018 yang masih di bawah standar.
- Masukan para Pakar/Akademisi dan seluruh undangan yang mengikuti tatap muka tersebut.

Gambaran Umum tentang hasil Indikator yang rendah dalam Rilis IDI tingkat Nasional tahun 2018 dan pencapaian perengkingan IDI Tingkat Provinsi NTT oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT, Untuk dibahas bersama dalam tatap muka bersama Kepala Bidang pada BAPPELITBANGDA Provinsi NTT, agar mencari jalan keluar demi peningkatan indikator yang kurang., agar sama-sama mencari jalan keluar demi peningkatan indikator-indikator yang rendah tersebut, untuk dijadikan penilaian akhir Nilai Indeks Demokrasi Provinsi NTT Tahun 2019.

Penjelasan BPS Provinsi NTT sebagai Team Enumerator tentang indikator yang rendah antara lain :

1. Indikator 10 " **Ancaman/Penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender,etnis dan keompok** " nilainya 41,
2. Indikator 3 " **Ancaman/Penggunaan kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat** " nilainya 100.00
3. Indikator 15 " **Presentase Anggota Perempuan DPRD** " nilainya 48,15
4. Indikator 16 " **Demonstrasi/Mogok yang bersifat Kekerasan** " nilainya 36,96
5. Indikator 22 " **Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif** " nilainya 14,29
6. Indikator 26 " **Upaya penyediaan layanan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah** " nilainya 50.00

3) Diskusi

a) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT

Pelaksanaan kegiatan Tatap Muka ini sudah direncanakan jauh sebelumnya namun baru terlaksana pada saat ini, adapun hal-hal yang akan disampaikan oleh Tim Pokja IDI NTT adalah :

1. Tim pokja IDI NTT mengharapkan BAPELITBANGDA Provinsi NTT sebagai user dalam penyusunan program dan kegiatan dapat memperhatikan Indikator-indikator yang tertuang dalam Tugas dan Fungsi pada OPD terkait sehingga dapat bekerjasama dalam memberikan data untuk peningkatan IDI di Provinsi NTT.
2. Sasaran IDI dalam pembangunan demokrasi di Indonesia pada umumnya dan Provinsi NTT terkhususnya ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara lain Pemerintah dan Masyarakat.
3. Komposit perkembangan Demokrasi di Indonesia tidak semua berpatokan pada pemerintah, namun gambaran kejadian dan respon dari masyarakat juga menjadi faktor penentu keberhasilan demokrasi baik di Indonesia maupun di Provinsi NTT.

b) Kepala BPS Provinsi NTT.

1. Cara Pengumpulan Data di BPS melalui :
 - Koding Koran
 - Dokumen
 - FGD
 - Wawancara Mendalam.
2. Semua Indikator yang dinilai bersifat dinamis sesuai dengan kejadian yang berlangsung pada tahun yang berjalan.

c) Kabid Pada BAPPELITBANGDA Provinsi NTT

1. Peran Pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk dapat meningkatkan demokrasi.
2. BAPPELITBANGDA Provinsi NTT akan berkoordinasi dengan OPD terkait yang mempunyai program dan kegiatan yang berhubungan dengan IDI, untuk peningkatan demokrasi di Provinsi NTT.
3. Banyak hal yang berhubungan dengan IDI yang belum didiskusikan dengan Tim Pokja IDI Provinsi NTT, untuk direview menjadi program dan kegiatan pada OPD terkait.
4. Harus dibentuk sekretariat bersama dengan OPD yang mempunyai Program dan Kegiatan yang berhubungan dengan IDI, sehingga terpusat data IDI dari OPD dimaksud, agar mudah menyuplai data ke BPS Provinsi NTT.

d) Bapak Stevi Yohanis (*Pemred Victori News NTT*)

1. Indikator – indikator yang ada dalam IDI semuanya diberitakan atau diekspose oleh media massa.
2. Semua Media Massa diberikan kesempatan untuk mengekspose atau menulis semua indikator yang ada.
3. Untuk memperoleh informasi tentang indikator-indikator yang kurang diharapkan BPS harus lebih pro aktif untuk mengakses melalui Website dan Facebook, karena semua data terdapat didalamnya.

e) Bapak Stef Wilahuki (*Kepala Sub Bidang Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT*).

1. IDI Provinsi NTT harus digambarkan secara Kuantitatif dan Kualitatif
2. Tim Pokja IDI tidak bisa merubah indikator-indikator yang sudah ditetapkan dari pusat.
3. Kurangnya sosialisasi tentang IDI sehingga banyak orang tidak tahu apa itu IDI, termasuk para anggota DPRD.
4. Rekomendasi dari DPRD kurang, bukan karena dari lembaga tapi juga adanya rekomendasi perorangan DPRD yang mungkin tidak disampaikan ke Eksekutif.

f) Bapak Ahmad Atang. (*Akademisi Universitas Muhammadiyah Kupang*)

1. Sudah ada peningkatan Perda Inisiatif
2. Informasi APBD ke publik tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun, tetap saja sama.
3. Anggota Tim Pokja IDI Provinsi NTT berharap adanya intervensi dari BAPPELITBANGDA Provinsi NTT, kepada OPD yang mempunyai

program dan kegiatan yang berhubungan dengan IDI, agar meningkatkan IDI di Provinsi NTT.

g) Bapak Hasym (*Pemred SKH Pos Kupang*)

1. Jika banyak sampel data yang diperoleh dari banyak majalah atau Koran akan lebih baik dan lebih akurat.
2. Harapan dari media Massa di tahun 2020, indikator yang berhubungan dengan informasi APBD akan lebih baik karena sudah di bentuk KIA di Provinsi NTT, dan semua informasi akan disampaikan secara terbuka dan transparan.
3. Belum adanya SOP yang jelas dari BAPPELITBANGDA Provinsi NTT.

h) Bapak Ronald (*Kasubid pada BAPPELITBANGDA Provinsi NTT*)

1. Harus ada Media perbandingan karena Provinsi NTT adalah daerah kepulauan dan bukan tidak mungkin Pos Kupang tidak menjangkau sampai ke semua pelosok.
2. Rekomendasi DPRD harus jelas mana yang akan disampaikan.
3. Informasi APBD masih belum semua di publikasikan ke masyarakat, karena alasan salah digunakan dan pembiasan informasi.

i) Kepala BPS Provinsi NTT.

1. Harus adanya sosialisasi dan tatap muka dengan DPRD untuk memperkenalkan IDI dan mengetahui hal apa yang menyebabkan rendahnya rekomendasi DPRD ke Eksekutif.
2. Diharapkan adanya rapat yang terjadwal antara Pokja IDI dengan BAPPELITBANGDA Provinsi NTT, agar informasi tidak terlewat dalam pemberitaan di media massa.
3. Persiapan rapat dengan KPU terkait kejadian-kejadian yang akan terjadi sebelum dan sesudah pemilu yang berkaitan dengan indikator IDI.

j) Ibu Theresia Geme (*Akademisi UNIKA Widya Mandira Kupang*)

1. BAPPELITBANGDA Provinsi NTT harus menjadi user dalam perencanaan IDI kedepan serta BAPPELITBANGDA Provinsi NTT dalam pengelolaan data dan informasi apakah menggunakan data IDI atau menggunakan data lain.
2. Metodologi IDI tidak mengalami perkembangan atau perubahan. Karena semua sudah di tetapkan dari pusat dengan berbagai teori yang menguatkan komposisi indikator IDI.

k) Bapak Jhon Tubahelan (*Akademisi UNDANA Kupang*)

1. Demokrasi itu sifatnya dinamis sehingga perkembangannya kadang bisa baik kadang bisa buruk.

2. Komposit metodologi IDI dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu dapat dirubah dan tidak dapat dirubah.
 3. Perkara TUN meningkat, hal ini perlu diantisipasi, karena meningkatnya perkara TUN disebabkan karena ego pimpinan yang tidak mau menyelesaikan perkara yang kecil.
- l) Bapak Jimmy Nami (*Akademisi Fisipol UNDANA Kupang*).
1. Dinamika yang berkembang harus selaras dengan informasi yang berkembang.
 2. Media Sosial merupakan sarana yang lebih mudah mengakses berita ke masyarakat.
 3. Sebaiknya ada beberapa Media Massa dijadikan acuan untuk memperoleh keabsahan dan fakta yang akan diambil.

4) KESIMPULAN DAN SARAN.

➤ Kesimpulan :

- a. Perkembangan IDI Tahun 2018 di Nusa Tenggara Timur walaupun mengalami perkembangan yang baik, namun ada beberapa aspek maupun indikator yang masih perlu perhatian dan didorong untuk pengembangannya di tahun-tahun yang akan datang yaitu :
 1. Indikator 10 " **Ancaman/Penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis dan kelompok** " nilainya 41,67 karena adanya pemasangan 2 (dua) orang di Kabupaten Sikka pada Tahun 2017, sedangkan Tahun 2018 tidak ada kasus pemasangan lagi sehingga nilainya akan meningkat.
 2. Indikator 3 " **Ancaman/Penggunaan kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat** " nilainya 100,00 di Tahun 2018, maka akan menurun di tahun 2019 karena adanya larangan Rektor undana untuk mahasiswa undana mengadakan demo.
 3. Indikator 15 " **Presentase Anggota Perempuan DPRD** " nilainya 48,15 di Tahun 2018 dan akan meningkat di Tahun 2019 karena penambahan jumlah Anggota Perempuan DPRD Provinsi.
 4. Indikator 16 " **Demostrasi/Mogok yang bersifat Kekerasan** " nilainya 36,96 karena di Tahun 2017 terdapat 10 kasus demo yang bersifat, dan Tahun 2018 juga terdapat jumlah kasus yang sama sehingga nilainya akan tetap sama di Tahun 2019.
 5. Indikator 22 " **Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif** " nilainya 14,29 karena di Tahun 2017 hanya terdapat 4 (empat) rekomendasi DPRD kepada Eksekutif namun di tahun 2018 meningkat menjadi 7 (tujuh) rekomendasi maka nilai IDI pada Tahun 2019 akan meningkat.

6. Indikator 26 " *Upaya penyediaan layanan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah* " nilainya 50.00 karena di Tahun 2017 dari 12 item informasi APBD Pemerintah Daerah yang harus di informasikan kepada masyarakat hanya 5 item saja, sedangkan di Tahun 2018 penambahan 1 (satu) item menjadi 6 item, sehingga nilai IDI pada Tahun 2019 akan mengalami peningkatan.
- b. Anggota Tim Pokja IDI NTT mengharapkan BAPPELITBANGDA Provinsi NTT menjadi user perencanaan dan menjadi mitra bersama dengan OPD terkait yang mempunyai Program dan Kegiatan IDI, untuk peningkatan IDI Provinsi NTT.
 - c. BAPPELITBANGDA Provinsi NTT harus menjadi user dalam perencanaan IDI kedepan serta BAPPELITBANGDA Provinsi NTT dalam pengelolaan data dan informasi apakah menggunakan data IDI atau menggunakan data lain.
 - d. Perkembangan IDI Tahun 2018 di Nusa Tenggara Timur walaupun mengalami perkembangan yang baik, namun ada beberapa aspek maupun indikator yang masih perlu perhatian dan didorong untuk pengembangannya di tahun-tahun yang akan datang yaitu :
 - ✓ Perlu peningkatan peran DPRD tentang Rekomendasi kepada Pemerintah.
 - ✓ Peningkatan aspek informasi APBD kepada masyarakat.
- Saran :
- 1. Rapat terpadu antara Tim Pokja IDI NTT dan BAPPELITBANGDA Provinsi NTT dilakukan secara berkala agar informasi terkait IDI di Provinsi NTT dapat terus terpantau dan diperbaiki.
 - 2. Perlu dibentuk sekretariat bersama dengan OPD yang mempunyai Program dan Kegiatan yang berhubungan dengan IDI, sehingga terpusat data IDI dari OPD dimaksud, agar memudahkan untuk mengidentifikasi data dan meneruskan ke BPS Provinsi NTT.

Kupang, 22 Juni 2020

Mengetahui,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kepala Bidang Politik

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196401101989032015

LUSIANA HERMANUS, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 196804051994032011

DOKUMENTASI





Lima Indikator Demokrasi jadi "PR" Pokja IDI NTT

Ada pun indikator yang bersifat stagnan berkaitan dengan soal alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, preinisiatif, dan soal informasi APBD kepada publik.

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) NTT, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), memberikan perhatian khusus terhadap lima indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi NTT tahun 2018 yang berpotensi menurun dalam pendataan IDI 2018.

Kelima indikator tersebut adalah pertama, keamanan/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, dan kelompok. Kedua, Prestasi anggota perempuan DPRD Provinsi, ketiga, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan/anarkis, keempat, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan kelima, upaya penyediaan layanan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah.

"Lima indikator ini, berpotensi untuk menurun di perhitungan IDI 2018 sehingga perlu menjadi catatan," ungkap Kepala Badan Kesbangpol NTT Johanna



PORUM RAPAT: Kepala Kesbangpol NTT, Johanna E. Lisapoly (tengah) memimpin rapat sasi Diskusi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di aula Bapeltbangda NTT, Senin (22/6).

Lisapoly dalam rapat Kelompok Kerja (Pokja) IDI Provinsi NTT, Senin (22/6) pagi di Aula kantor Bapeltbangda NTT.

Hadir dalam rapat tersebut, Kepala BPS NTT Darwin Sitorus, akademisi Dr. Yohanes Tuba Helan, Dr. Ahmad Atang, Dr. Maria Tereza Geme, Dr. Jimi Nani, Kabid Litbang Yohanes Atsepah, perwakilan Korem 161 Wira Sakti, dan sejumlah OPD terkait serta pers.

Johanna menjelaskan, kelima indikator tersebut merupakan indikator berkaitan berpotensi menurun yang dihasilkan dari perbandingan capaian demokrasi NTT dalam periode IDI tahun 2017 dan 2018.

Menurutnya, IDI Provinsi NTT

pada 2018 menduduki peringkat ketiga terbaik nasional dengan indeks 82,32. Dibandingkan dengan IDI 2017 lalu, NTT di posisi 13 dengan indeks 73,51.

"Ya kita bersyukur kali ini kita naik 10 tingkat dari posisi 13 ke tiga. Meski begitu, kita masih berkategori baik. Tapi kita juga harus menurakan lima indikator berpotensi menurun itu," ujar Lisapoly.

Kepala BPS NTT Darwin Sitorus menambahkan, IDI tersusun dari 28 indikator, 11 variabel dan tiga aspek demokrasi. Interpretasi indeks ini diklasifikasikan dalam tiga kategori, yakni klasifikasi "baik" nilai indeks 80-100, klasifikasi "sedang" nilai indeks 60-80,

dan klasifikasi "buruk" nilai indeks 0-60.

Nilai indeks ini diperoleh dari pengumpulan data melalui tiga tahapan yakni review hanya satu media saja (Pos Kupang), dokumen-dokumen pemerintah, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam terkait kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan indikator IDI.

Kesiapan Program

Sedangkan Dr. Yohanes Tuba Helan menjelaskan, demokrasi merupakan suatu hal yang dinamis sehingga perkembangannya itu diandalkan bisa naik, bisa turun, dan sebaliknya.

Berkaitan dengan informasi yang bisa diupayakan seperti

APBD, menurut dia, hal yang gampang, tetapi tidak dilakukan sehingga nilai kita buruk setiap tahun.

Oleh karenanya, dibutuhkan peran OPD dan Bapeltbangda untuk mengkoordinasi semua OPD sehingga bisa bekerja supaya indeks nilai demokrasi bisa lebih baik.

Dr. Ahmad Atang menjelaskan, dari tahun ke tahun ada indikator yang stagnan. Ada pun indikator yang bersifat stagnan berkaitan dengan soal alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, preinisiatif, dan soal informasi APBD kepada publik.

Dr. Jimmy Nani menegaskan bahwa, problem sesungguhnya adalah ketika Negara tidak mampu berjalan sama cepatnya dengan dinamika sosial.

"Saya analogi dulu Wali Kota Jokowi dengan gampang mempublikasi APBD dengan menggunakan video drone, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi ke kantor Kota dan dia cukup berhenti motor dan mencatat," ujarnya.

Dikatakan, jika orang susah untuk untuk mengakses (APBD). Maka, orang menganggap tidak ada fasilitas pemerintah terhadap informasi.

Dr. Maria Tereza Geme menyebutkan sikap dari statistik yang tetap saja terpaku pada apa yang sudah ditetapkan tetapi mengabaikan metodologi tidak mengikuti dinamika (pasal 61/3-4).



TERIMA KASIH